



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGRA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI
SETIAP OHOI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap ohoi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1967);
15. Peraturan Daerah kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);

16. Peraturan Daerah Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratschap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI SETIAP OHOI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut ohoi, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Ohoi adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
3. Pemerintah Ohoi adalah kepala ohoi dibantu perangkat ohoi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ohoi;
4. Jumlah Ohoi adalah jumlah Ohoi yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disingkat APBOhoi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan ohoi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Maluku Tenggara ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 4

Alokasi Dasar per Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Ohoi Tahun

2016 dibagi jumlah ohoi di Kabupaten.

Pasal 5

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap ohoi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana desa setiap ohoi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis ohoi setiap Kabupaten;
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap ohoi terhadap total penduduk ohoi nasional;
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap ohoi terhadap total penduduk miskin ohoi nasional;
- Z3 = Rasio luas wilayah ohoi setiap ohoi terhadap total penduduk miskin ohoi nasional;
- Z4 = Rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki ohoi;
- DDKab = Pagu dana desa Kabupaten;
- ADKab = Besaran alokasi dana untuk setiap ohoi dikalikan jumlah ohoi dalam Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Ohoi.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Ohoi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi Dana Ohoi diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi tahap I dilakukan setelah kepala ohoi menyampaikan :
 - a. Peraturan ohoi mengenai APBOhoi kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Kepala ohoi menyampaikan peraturan ohoi dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi tahap II dilakukan setelah kepala ohoi menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I kepada Bupati;

- b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Ohoi tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Kepala ohoi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi Tahap III dilakukan setelah kepala ohoi menyampaikan:
- a. Penyaluran Alokasi Dana Ohoi tahap III dilakukan setelah Kepala ohoi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I dan tahap II kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Ohoi tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Kepala ohoi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Alokasi Dana Ohoi yang diterima ohoi setiap tahun dianggarkan dalam APBOhoi.

Pasal 9

Alokasi Dana Ohoi diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan ohoi dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBOhoi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Jur Tulis atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBOhoi tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBOhoi ditetapkan menjadi Peraturan Ohoi.
- (4) Bendahara ohoi sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Ohoi dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I, tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Ohoi dalam hal kepala ohoi tidak menyampaikan APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Ohoi dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Ohoi yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Ohoi yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Ohoi yang diterima ohoi.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Ohoi yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Alokasi Dana Ohoi dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal, 4 Januari 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal, 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 3